

MODEL KEPUTUSAN

(Allison, 1981)

1. Rational actor;
Sosok pemerintah sebagai kotak-hitam, spt aktor individual
2. Organisational process;
Kebijakan sebagai output organisasi, dg struktur, sistem koordinasi, kerjasama antar-satuan, SOP. Ekspektasi thd kebijakan: inkremental
3. Bureaucratic politics;
Kebijakan pemerintah adl produk politik, tawar-menawar, tergantung persepsi dan posisi para pelaku. "Where you stand depends on where you sit".

ARENA KEBIJAKAN PUBLIK

(Thomas & Grindle, 1991)

1. Macro-politics / perceived crisis;

- Situasi krisis
- Kebijakan mempengaruhi legitimasi rejim
- Sasaran jangka-panjang
- Kepentingan nasional
- Konflik antar-kelas berskala besar

2. Micro-politics / politics as usual;

- Penggunaan sumberdaya
- Kepentingan parokhial
- Persaingan kontrol politik

Tumbangnya Orde Baru



INSTRUMEN KEBIJAKAN

1. Peraturan perundangan;

Kewenangan membuat peraturan perundangan adalah sumberdaya unik bagi pemerintah

2. Layanan umum (*public services*);

Pemerintah = organisasi penyelenggara layanan umum paling besar. Catatan: terkadang swasta & Ornop lebih efektif, efisien

3. Dana;

Ideal: 45% untuk kesra. Di Indonesia: 69% untuk aparat.

4. Pajak;

"The government giveth and the government taketh away". Pembebasan pajak (tax holiday) & pajak progresif sebagai instrumen distribusi.

5. Imbauan (*suasion*);

Atas nama kepentingan umum, pemerintah punya posisi lebih baik untuk menyampaikan imbauan.

TATA-URUTAN PERUNDANGAN

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Perpu
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Catatan:

1. Semua pihak harus dilindungi haknya
2. Efektivitas perundangan berlain-lainan. Kelengkapan perundangan tidak menjamin kualitas kebijakan yg baik